

Analisis Dampak APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sosial

Ani Irawan¹⁾, Hana Siti Nabila²⁾, Yolla Maharany Irawan³⁾, Noer Apptika Fujilestari⁴⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani

Correspondence

Email: aniirawan54@gmail.com¹

No. Telp: -

hanasitinabila26@gmail.com²yollamaharany01@gmail.com³noerapptika@gmail.com⁴

Submitted 9 November 2024

Accepted 15 November 2024

Published 16 November 2024

Abstract

This research aims to analyze the impact of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) on economic growth and social development in Indonesia. The APBN as a fiscal policy instrument plays an important role in distributing resources to encourage inclusive economic growth and improve community welfare. Using the literature study method, this research examines budget allocations in main sectors, such as education, health and infrastructure, as well as their impact on various social indicators, including levels of poverty, unemployment and social inequality. The results of the analysis show that the APBN has great potential in encouraging sustainable economic growth and social development, but its effectiveness is still hampered by accountability problems and inaccurate targets in budget allocation. These findings provide recommendations for policy makers to increase the transparency and effectiveness of APBN management in order to maximize the positive impact on economic growth and social welfare in Indonesia.

Keywords: APBN, economic growth, social welfare, budget allocation, social inequality.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di Indonesia. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mendistribusikan sumber daya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji alokasi anggaran pada sektor-sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dampaknya terhadap berbagai indikator sosial, termasuk tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa APBN memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh masalah akuntabilitas dan ketidaktepatan sasaran dalam alokasi anggaran. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan APBN guna memaksimalkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: APBN, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, alokasi anggaran, ketimpangan sosial.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sebagai instrumen kebijakan fiskal utama, APBN bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya pendapatan pemerintah ke berbagai bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga alokasi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan APBN secara efektif, pemerintah dapat mengatasi permasalahan struktural dalam perekonomiannya, seperti kesenjangan sosial dan rendahnya daya saing nasional, serta memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Secara teori, belanja pemerintah melalui APBN memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Teori Keynesian menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau sedang mengalami tekanan, seperti ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi, pengeluaran pemerintah menjadi alat penting untuk mendorong permintaan



agregat (Keynes, 1936). Keynes mengidentifikasi tiga indikator utama yang memengaruhi permintaan agregat dan mendorong perekonomian secara keseluruhan: konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah.

Pertama, konsumsi merupakan pendorong utama dalam meningkatkan permintaan agregat. Melalui APBN, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang mendorong konsumsi, seperti subsidi dan bantuan sosial, guna meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Alokasi dana untuk konsumsi ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan sosial dan memperkuat daya beli masyarakat sebagai dasar untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Konsumsi yang didukung oleh belanja sosial dalam APBN juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Selain konsumsi, investasi juga memainkan peran vital dalam pembangunan. Keynes menegaskan bahwa investasi dapat memperkuat kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas ekonomi (Keynes, 1936). Di Indonesia, pemerintah melalui APBN mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, yang berpotensi menciptakan efek berantai bagi perekonomian. Proyek-proyek infrastruktur yang didanai APBN, seperti pembangunan jalan tol, sarana transportasi, dan konektivitas antardaerah, dapat mendorong investasi swasta dan meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Komponen ketiga, yaitu pengeluaran pemerintah, merupakan instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan permintaan agregat di tengah perlambatan ekonomi (Keynes, 1936). Pengeluaran pemerintah dalam APBN Indonesia diarahkan ke sektor-sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi ketimpangan sosial. Belanja pemerintah yang efisien dan terarah tidak hanya berfungsi sebagai stimulus jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, ketiga indikator menurut teori Keynes ini—konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah—merupakan komponen utama dalam APBN yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Namun, efektivitas APBN di Indonesia sering kali dibatasi oleh berbagai tantangan, seperti penargetan yang tidak tepat, rendahnya transparansi, dan ketimpangan alokasi anggaran antar daerah. Akibatnya, dampak pembangunan di beberapa wilayah belum merata, dan kesenjangan sosial-ekonomi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Dampak APBN terhadap pertumbuhan sosial-ekonomi sangat dipengaruhi oleh prioritas alokasi anggaran tahunan. Jika porsi anggaran dialokasikan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dan pendidikan, APBN dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang meningkatkan produktivitas nasional dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar dunia. Namun, alokasi yang tidak tepat justru dapat menyebabkan inefisiensi dan memperparah ketimpangan regional. Misalnya, dominasi alokasi anggaran ke pusat pemerintahan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, yang memperlebar disparitas wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis dampak APBN terhadap pertumbuhan ekonomi sosial di Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini meninjau bagaimana alokasi APBN berdampak pada indikator sosial-ekonomi, seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengoptimalkan APBN guna mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengumpulkan dan mengintegrasikan hasil-hasil dari berbagai studi terdahulu yang relevan, memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas APBN dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan publikasi organisasi internasional seperti Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, World Bank, dan Dana Moneter Internasional (IMF). Melalui analisis tematik, data ini dikelompokkan berdasarkan topik utama—termasuk belanja publik dan dampak APBN pada indikator makroekonomi seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan investasi. Temuan-temuan dari berbagai sumber ini kemudian dievaluasi untuk memahami hubungan antara kebijakan anggaran dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan efektivitas APBN dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.).

PEMBAHASAN

1. Dampak APBN terhadap Pertumbuhan Ekonomi

APBN merupakan instrumen penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, pembahasan ini menunjukkan bagaimana APBN dialokasikan pada sektor-sektor yang strategis, khususnya infrastruktur dan pendidikan. Kedua sektor ini merupakan pilar utama yang diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi berbagai tantangan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan.

1.1 Alokasi anggaran untuk infrastruktur

Infrastruktur menjadi fokus utama APBN karena perannya dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, yang secara langsung mendukung aktivitas perekonomian. Data menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran infrastruktur dari Rp 300 triliun pada 2015 menjadi Rp 500 triliun pada 2022 berdampak signifikan pada konektivitas dan mobilitas ekonomi. Seperti diuraikan dalam latar belakang, dengan adanya peningkatan anggaran ini, pemerintah mampu membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan bandara. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi juga menurunkan ketimpangan wilayah yang terjadi karena aksesibilitas yang berbeda-beda. Upaya ini sesuai dengan tujuan utama APBN yang ditetapkan untuk menstimulasi perekonomian nasional serta memperluas kesempatan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil.

SWOT:

- Strengths (Kekuatan):** APBN memberikan dukungan finansial yang signifikan pada infrastruktur, yang memacu konektivitas nasional.
- Weaknesses (Kelemahan):** Implementasi proyek infrastruktur terkadang mengalami kendala manajerial, mengakibatkan keterlambatan atau penurunan kualitas.
- Opportunities (Peluang):** Infrastruktur yang meningkat membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal dan menarik investasi asing.
- Threats (Ancaman):** Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antarwilayah dapat memperparah kesenjangan ekonomi, terutama antara

1.2 Peningkatan mutu pendidikan

Pendidikan merupakan sektor strategis lainnya dalam APBN, karena memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional. Peningkatan alokasi untuk pendidikan dari Rp 400 triliun pada 2015 menjadi Rp 600 triliun pada 2022 menunjukkan komitmen dalam mengembangkan kompetensi tenaga kerja nasional. Seperti dijelaskan dalam latar belakang, peningkatan kualitas pendidikan dapat menurunkan angka kemiskinan dengan memberikan masyarakat akses pada kesempatan yang lebih baik. Program-program pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembangunan infrastruktur sekolah turut meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang layak, yang pada gilirannya mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan APBN yang ingin memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pendidikan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sejahtera.

SWOT:

- Strengths (Kekuatan):** Peningkatan anggaran pendidikan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan berkualitas.
- Weaknesses (Kelemahan):** Distribusi anggaran pendidikan kadang tidak merata, membuat beberapa wilayah tertinggal.
- Opportunities (Peluang):** Pendidikan yang lebih baik akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan meningkatkan daya saing nasional.
- Threats (Ancaman):** Ketidakseimbangan kualitas pendidikan antarwilayah dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan ekonomi.

2. Dampak Sosial dari APBN

Pada sisi sosial, APBN berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Dalam latar belakang, telah ditegaskan bahwa APBN dirancang untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Pembahasan berikut menguraikan implementasi nyata dari tujuan tersebut.

2.1 Pengurangan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 10,7% pada tahun 2015 menjadi 9,4% pada tahun 2022. Program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Analisis menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% belanja program sosial mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja sosial yang tepat sasaran mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Laporan Program Keluarga Harapan Tahun 2022).

SWOT:

- Strengths (Kekuatan):** APBN mendanai program sosial yang efektif mengurangi kemiskinan.
- Weaknesses (Kelemahan):** Target bantuan sosial masih belum sepenuhnya mencakup masyarakat termiskin yang paling membutuhkan.
- Opportunities (Peluang):** Bantuan sosial yang tepat sasaran dapat terus mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
- Threats (Ancaman):** Keterbatasan anggaran dan tantangan distribusi dapat membatasi capaian program ini.

2.2 Ketimpangan Sosial dan Indeks Gini

Kemiskinan telah menurun, namun tantangan kesenjangan sosial masih tetap ada. Indeks Gini yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan akan menunjukkan nilai 0,38 pada tahun 2022 yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa ketimpangan ini lebih besar terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, serta antara Indonesia bagian barat dan timur. Dalam laporan oleh (Bank, 2020) Bahwa pemerataan alokasi anggaran antar daerah dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar.

SWOT:

- a. Strengths (Kekuatan): Dana sosial APBN memungkinkan pemerataan akses pada layanan dasar.
- b. Weaknesses (Kelemahan): Ketimpangan sosial masih tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan wilayah timur Indonesia.
- c. Opportunities (Peluang): Pemerataan alokasi dana berpotensi menurunkan ketimpangan sosial antarwilayah.
- d. Threats (Ancaman): Ketidakadilan distribusi anggaran dapat memperparah ketimpangan antarwilayah.

3. Tantangan dalam Pengelolaan APBN

Walaupun dampak positif APBN terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial terlihat jelas, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi:

1.1 Ketidaktepatan Alokasi Anggaran

Salah satu tantangan terbesarnya adalah ketidakakuratan alokasi anggaran. Dalam banyak kasus, daerah-daerah dengan kebutuhan lebih besar tidak mendapatkan pendanaan yang memadai, sehingga program-program sosial tidak menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Penelitian oleh (Kurniawan & Sari, 2019) menunjukkan bahwa redistribusi anggaran yang lebih merata perlu dilakukan untuk mencapai keadilan social.

SWOT:

- a. Strengths (Kekuatan): APBN memiliki potensi untuk meratakan distribusi dana ke seluruh wilayah Indonesia.
- b. Weaknesses (Kelemahan): Ketidaktepatan alokasi sering mengakibatkan wilayah tertentu kekurangan dana.
- c. Opportunities (Peluang): Redistribusi anggaran yang adil dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap APBN.
- d. Threats (Ancaman): Distribusi yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan ketidakpercayaan.

1.2 Akuntabilitas dan Transparansi

Isu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBN juga menjadi perhatian. Rendahnya tingkat transparansi seringkali meningkatkan inefisiensi dan dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran. (Susanti, Hartono, & Putri, 2020) menunjukkan bahwa masyarakat kehilangan kepercayaan ketika terjadi peristiwa penyalahgunaan dana publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

SWOT:

- a. Strengths (Kekuatan): APBN menyediakan kerangka kerja pengawasan dana publik.
- b. Weaknesses (Kelemahan): Tingkat transparansi masih rendah, yang dapat menghambat efektivitas pengawasan.

- c. Opportunities (Peluang): Peningkatan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APBN.
- d. Threats (Ancaman): Penyalahgunaan dana publik dapat terjadi tanpa transparansi yang ketat.

1.3 Kebijakan yang Responsif dan Adaptif

Kebijakan pemerintah harus merespons perubahan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menanggapi tantangan global seperti pandemi COVID-19. (Bappenas, 2021) merekomendasikan perlunya mengembangkan kerangka kebijakan adaptif yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis.

SWOT:

- a. Strengths (Kekuatan): APBN yang fleksibel memungkinkan pemerintah merespons krisis dengan cepat.
- b. Weaknesses (Kelemahan): Kebijakan yang tidak adaptif dapat menghambat respons cepat.
- c. Opportunities (Peluang): APBN yang adaptif akan lebih siap menghadapi situasi tak terduga seperti krisis global.
- d. Threats (Ancaman): Ketidakmampuan beradaptasi dengan cepat dapat memperburuk dampak krisis.

KESIMPULAN

Dari analisis terhadap dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa APBN memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan program sosial terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan kemiskinan. Peningkatan investasi pada infrastruktur telah meningkatkan konektivitas antarwilayah, sementara alokasi untuk pendidikan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses layanan dasar yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Program sosial seperti PKH dan BPNT juga berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil ketimpangan sosial.

Namun, meskipun terdapat potensi besar, efektivitas APBN dalam mencapai tujuan tersebut masih terkendala oleh berbagai tantangan, terutama terkait dengan masalah akuntabilitas, ketepatan sasaran alokasi anggaran, serta ketimpangan distribusi dana antara daerah. Ketidaktepatan dalam alokasi anggaran sering kali mengakibatkan beberapa wilayah kekurangan dana untuk program-program pembangunan yang sangat dibutuhkan, sementara ketimpangan sosial dan ekonomi tetap menjadi isu besar, terutama antara wilayah barat dan timur Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN, serta melakukan redistribusi anggaran yang lebih merata untuk mencapai keadilan sosial. Peningkatan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat juga sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi atau pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank, W. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results*. World Bank.
- Bappenas. (2021). *Laporan Pembangunan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Badan Perencanaan

- Pembangunan Nasional.
- Booth, A. S. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literatur Review*. Sage Publications.
- H. Snyder. (2019). *Literature review as research methodology : An overview and guidelines*. Journal of bussiness research, 333-339.
- Indonesia, K. S. (2022). *Laporan Program Keluarga Harapan Tahun 2022*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- Kurniawan, A., & Sari, M. (2019). *Analisis Distribusi Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.
- Susanti, N., Hartono, D., & Putri, R. (2020). *Efektivitas Pengelolaan APBN dalam Mendukung Pembangunan Sosial Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Macmillan.